



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD AMIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **453561**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

1.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/140 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 74 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/80 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 91 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

127.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FLYL 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, YAMAHA 1FDC CAST WHEEL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

3.780.637

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

1.306.280.637



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.306.280.637

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.